

Peran KUR Syariah dalam Peningkatan Inklusi Keuangan: Studi Kasus pada BSI KCP Sidoarjo *Gateway*

Nukma Nilam Sari^{1*}, Ninda Ardiani²

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: nukmanilamsari.25@gmail.com¹, nindaardiani@umsida.ac.id²

*) Corresponding Author

Submitted: 12 Dec 2025
Revised: 19 Jan 2026
Accepted: 13 May 2026
Published: 18 May 2026

How to Cite:

Sari, N. N., & Ardiani, N.
(2026). The Role of Sharia
KUR in Enhancing
Financial Inclusion: A Case
Study of BSI KCP Sidoarjo
Gateway. Jurnal
Iqtisaduna, 12(1), 181-
191.
[https://doi.org/10.24252/
iqtisaduna.v12i1.63532](https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v12i1.63532)



Copyright © 2026 by
Authors

ABSTRACT

This study aims to analyze the development of Shariah People's Business Credit (KUR Syariah) distribution to support increased financial inclusion, focusing on its implementation at BSI KCP Sidoarjo *Gateway*. The study adopts a qualitative approach using in-depth interviews with *marketing* staff and MSME customers to obtain a comprehensive understanding of the financing program's mechanisms, procedures, and effectiveness. The findings indicate that KUR Syariah distribution has experienced significant growth in recent years, in line with the rising capital needs of MSMEs. Sharia-based financing features, transparent margins, and relatively simple application procedures are key factors that encourage strong community participation. *Marketing* strategies such as outreach activities, partnerships with local governments, and the use of digital media have proven effective in expanding access to Sharia financial services. Moreover, *marketing* staff play roles not only as marketers but also as educators and facilitators in improving Sharia financial literacy. Overall, KUR Syariah enhances inclusive access nationwide.

Keywords: Sharia KUR, Financial Inclusion, MSMEs, Sharia Financing, Sharia Financial Literacy

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan distribusi Kredit Usaha Syariah (KUR Syariah) dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan, dengan fokus pada implementasinya di KCP BSI Sidoarjo *Gateway*. Studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam terhadap staf pemasaran dan pelanggan UMKM untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme, prosedur, dan efektivitas program pembiayaan tersebut. Temuan menunjukkan bahwa distribusi KUR Syariah telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan modal UMKM. Karakteristik pembiayaan berbasis Syariah, margin yang transparan, dan prosedur aplikasi yang relatif sederhana merupakan faktor kunci yang mendorong partisipasi masyarakat yang kuat. Strategi pemasaran seperti kegiatan penyuluhan, kemitraan dengan pemerintah daerah, dan penggunaan media digital telah terbukti efektif dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan Syariah. Selain itu, staf pemasaran berperan tidak hanya sebagai pemasar, tetapi juga sebagai pendidik dan fasilitator dalam meningkatkan literasi keuangan Syariah. Secara keseluruhan, KUR Syariah meningkatkan akses inklusif di seluruh negeri.

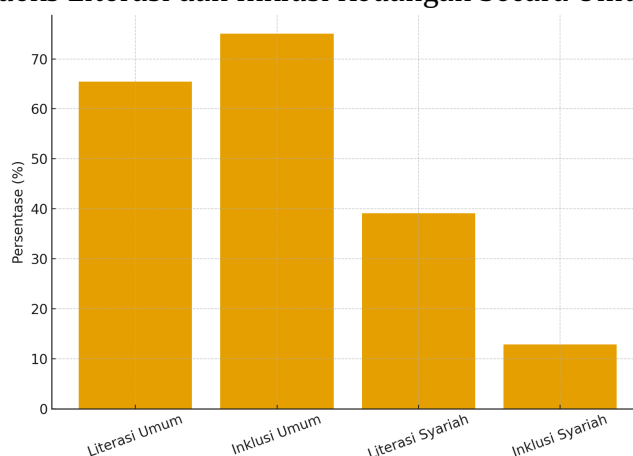
Kata Kunci: KUR Syariah, Inklusi Keuangan, UMKM, Pembiayaan Syariah, Literasi Keuangan Syariah

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan merupakan upaya perluasan akses, ketersediaan, dan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks perbankan syariah, inklusi keuangan bukan hanya dimaknai sebagai perluasan jangkauan layanan, tetapi juga sebagai penguatan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, inklusi keuangan masih menjadi agenda strategis nasional (Pratiwi et al., 2023). Pemerintah bersama otoritas terkait menjalankan program inklusi keuangan sebagaimana dalam laporan (OJK, 2020), antara lain melalui program Simpanan Pelajar (SimPel) dan program Layanan Keuangan dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang telah menjangkau ribuan desa, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan keuangan tanpa harus ke kantor cabang. Di sisi lain, (Masitoh & Sulistiowati, 2025) mengutip pernyataan Deputy Gubernur BI bahwa pemanfaatan pembayaran digital juga semakin masif melalui QRIS, yang hingga 2025 mencatat 57 juta pengguna, 39,3 juta *merchant*, dan 6,05 miliar transaksi dengan nilai Rp579 triliun. Namun demikian, peningkatan akses tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat literasi keuangan yang memadai, terutama di sektor keuangan syariah.

Berdasarkan survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebagai berikut:

Gambar 1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Secara Umum dan Syariah



Sumber: Hasil SNLIK 2024 OJK & BPS, diolah (2026)

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada bagan di atas menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43% dan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Sementara itu, literasi keuangan syariah masih berada pada angka 39,11% dan inklusi keuangan syariah hanya mencapai 12,88% (OJK, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang memerlukan penguatan instrumen pembiayaan berbasis syariah yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya melalui program Kredit Usaha Mikro (KUR) Syariah yang dirancang untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Peluang besar untuk pengembangan layanan keuangan syariah, khususnya pembiayaan bersubsidi pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Secara empiris, penelitian yang dilakukan oleh (Agustin et al., 2023) membuktikan bahwa KUR syariah mampu meningkatkan akses pembiayaan UMKM, sementara (Alya & Rahman, 2024) menemukan bahwa strategi penyaluran dan pemasaran KUR syariah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji peran staf pemasaran KUR syariah di tingkat cabang pembantu (KCP) dalam mendorong inklusi keuangan syariah masih relatif terbatas.

KUR Syariah merupakan pembiayaan produktif yang disalurkan berdasarkan prinsip syariah dan didukung oleh skema subsidi serta penjaminan pemerintah (Sabilah & Hafizd, 2025). Pemerintah menempatkan KUR sebagai instrumen utama pemberdayaan UMKM sekaligus perluasan akses keuangan, dan terus memperbarui regulasi KUR melalui Permenko Perekonomian No. 7 Tahun 2024, serta meningkatkan alokasi penyaluran KUR syariah dari tahun ke tahun. Target penyaluran KUR syariah meningkat dari Rp21 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp35,5 triliun pada tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai Rp108,6 triliun pada tahun 2028 (OJK, 2023).

Ekosistem perbankan syariah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) ditetapkan sebagai salah satu bank penyalur utama Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Pada tahun 2024, BSI menerima kuota sebesar Rp16 triliun untuk disalurkan, dan penyerapan aktual dilaporkan mencapai sekitar Rp15,42 triliun kepada lebih dari 131.000 pelaku usaha. Salah satu wilayah yang memiliki potensi UMKM besar adalah Kabupaten Sidoarjo, dengan jumlah UMKM mencapai sekitar 176.000 unit usaha (PEMKAB, 2024). Namun demikian, kendala dalam penyaluran KUR syariah, adalah minimnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah, keterbatasan legalitas usaha (NIB/Izin), kendala agunan, dan kurangnya literasi digital sebagaimana dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (OJK, 2022). Kondisi ini menjadikan staf pemasaran KUR Syariah sebagai ujung tombak yang strategis, tidak hanya dalam pemasaran produk, tetapi juga dalam edukasi, pendampingan, dan perluasan akses terhadap keuangan syariah. KUR sendiri merupakan produk layanan keuangan pembiayaan produktif bersubsidi pemerintah yang bertujuan memperkuat permodalan UMKM melalui skema prinsip syariah. Sebagai penyalur resmi, BSI juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyaluran KUR Syariah tepat sasaran.

Realisasi penyaluran KUR hingga 31 Desember 2024 di wilayah Jawa Timur mencapai Rp 46,62 triliun (Ditjen Perbendaharaan, 2024). Seiring dengan pencapaian tersebut, porsi KUR Syariah juga terus meningkat, didorong oleh minat pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian, perkembangan tersebut masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan struktural, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan kelengkapan legalitas usaha pada pelaku mikro, serta distribusi pembiayaan yang masih terkonsentrasi pada sektor-sektor tertentu sehingga belum sepenuhnya merata. Realita ini menunjukkan bahwa meskipun KUR Syariah berperan signifikan dalam perekonomian, terdapat tantangan struktural yang harus diatasi agar manfaatnya dapat lebih inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa KUR syariah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM, tidak hanya mengurangi beban finansial nasabah, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan dan kondisi ekonomi masyarakat. Namun, penelitian yang secara khusus menyoroti peran *marketing* KUR Syariah di level KCP Sidoarjo *Gateway* dalam mendorong inklusi keuangan syariah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada BSI KCP Sidoarjo *Gateway*.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara menyeluruh upaya peningkatan inklusi keuangan syariah melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: pertama, menganalisis perkembangan penyaluran KUR Syariah dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di wilayah Sidoarjo. Kedua, mempelajari pelaksanaan KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sidoarjo *Gateway* dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Ketiga, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi staf pemasaran dalam proses penyaluran KUR Syariah serta strategi yang diterapkan untuk mengatasinya guna mendukung optimalisasi inklusi keuangan syariah. Seluruh fokus tersebut disusun berdasarkan kerangka

berpikir yang menjelaskan hubungan antara perkembangan penyaluran KUR syariah, implementasi program di tingkat cabang, serta tantangan yang dihadapi staf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus (Rokhamah et al., 2020). Penelitian kualitatif dipilih karena, tujuan penelitian adalah memahami secara mendalam praktik, makna, dan proses yang dijalankan oleh pegawai/*marketing* KUR Syariah dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan syariah, baik dari sisi perkembangan maupun implementasinya di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis perkembangan penyaluran KUR Syariah dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, mengkaji secara mendalam implementasi KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo *Gateway* dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh pegawai *marketing* dalam proses penyaluran KUR Syariah dan strategi yang mereka terapkan untuk mengatasinya demi mengoptimalkan inklusi keuangan syariah.

Gambar 2. Kerangka Pikir



Studi kasus merupakan strategi penelitian yang paling tepat digunakan ketika pertanyaan penelitian berfokus pada “bagaimana” *how* atau “mengapa” *why* suatu peristiwa terjadi. Pendekatan ini sesuai digunakan ketika peneliti memiliki kendali yang terbatas terhadap peristiwa yang diteliti, serta ketika penelitian berfokus pada fenomena yang terjadi pada masa kini (kontemporer) dalam konteks kehidupan nyata, bukan dalam kondisi yang dibuat atau dikendalikan secara buatan. Penelitian kualitatif oleh Firmansyah et al. (2021) menegaskan orientasi pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang kompleks. Studi kasus memungkinkan peneliti menelaah fenomena dalam konteks nyata.

Lokasi yang digunakan untuk penelitian yaitu Bank Syariah Kantor Cabang Sidoarjo *Gateway*. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor cabang tersebut merupakan salah satu unit kerja yang aktif menyalurkan KUR Syariah kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

Data yang didapat oleh peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Data primer tersebut peneliti dapatkan secara langsung melalui wawancara dengan pihak BSI. Data dikumpulkan dengan metode langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan bertemu langsung dengan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan

secara valid dan akurat. Data sekunder peneliti dapat diperoleh melalui studi jurnal yang membahas KUR syariah dan kaitannya dengan inklusi keuangan yang dapat menyejahterakan ekonomi masyarakat, termasuk UMKM.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer ini didapatkan melalui wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sidoarjo *Gateway*. Wawancara dilakukan terhadap *marketing* pembiayaan KUR syariah atau pihak yang terkait dengan penyaluran KUR di bank syariah tersebut. Informan dalam penelitian ini berjumlah dua orang yang dipilih, berdasarkan individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Kriteria informan meliputi, (1) berpengalaman selama menjadi pegawai yang bekerja di bagian *marketing* pembiayaan KUR Syariah, (2) memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dalam penyaluran KUR Syariah, dan (3) memahami proses pengajuan hingga realisasi pembiayaan KUR Syariah. Kedua informan tersebut merupakan pihak yang berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi dan penyaluran KUR Syariah di BSI KCP Sidoarjo *Gateway*.

Untuk memperoleh data yang lengkap, digunakan beberapa teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara dilakukan kepada pegawai *marketing* untuk menggali informasi mengenai strategi sosialisasi proses penyaluran KUR, implementasi KUR, serta tantangan dalam implementasi KUR Syariah. Peneliti juga melaksanakan observasi dengan mengamati secara langsung aktivitas pegawai *marketing* dalam melakukan pelayanan dan sosialisasi KUR Syariah kepada nasabah tanpa ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Kemudian, data sekunder merupakan data tertulis dalam penelitian ini berupa jurnal, artikel, atau buku-buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi penelitian tentang KUR di Bank Syariah bagi masyarakat, khususnya UMKM.

Penelitian kualitatif menggunakan strategi studi kasus yang didasarkan pada sumber bukti yang menjadi fokus pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi langsung, dan pengumpulan data. Langkah -langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

Gambar 3. Diagram Alur Penelitian



Peneliti dalam hal ini melakukan persiapan – persiapan, membuat surat izin penelitian kepada Fakultas Agama Islam dan Program Studi untuk melaksanakan penelitian kepada pihak BSI Sidoarjo *Gateway*. Kemudian peneliti mengirimkan surat izin kepada pihak BSI Sidoarjo *Gateway*. Jika surat izin telah disetujui, proses selanjutnya adalah penelitian lapangan. Proses penelitian lapangan dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari pihak BSI Sidoarjo *Gateway*. Peneliti mewawancarai pihak yang berkecimpung langsung dalam pembiayaan KUR Syariah, yaitu *marketing* atau yang ahli dalam bidang pembiayaan KUR Syariah,

dan dari sanalah peneliti juga dapat dibantu untuk meninjau seberapa jauh KUR Syariah meningkatkan inklusi keuangan karena dalam hal ini peneliti juga dapat mengetahuinya. Pertanyaan yang diajukan peneliti telah disusun secara terstruktur, dan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian, peneliti mengkaji dan mengobservasi implementasi yang dilaksanakan oleh *marketing* terhadap layanan KUR syariah pada nasabah BSI tersebut dengan mengamati beberapa tindakan yang dilakukan oleh *marketing* atau pihak yang ahli dalam bidangnya untuk mengidentifikasi apakah proses penyaluran KUR syariah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Proses terakhir yaitu mengidentifikasi adanya kendala atau tantangan yang dihadapi oleh *marketing* dalam penyaluran KUR syariah kepada masyarakat, khususnya pada UMKM.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tiga tahapan, yaitu mereduksi data dengan cara proses pemilihan data, pemusatan, dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan dan wawancara. Kemudian, penyajian data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau bagan yang dapat mempermudah pemahaman. Lalu penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan informan yang dipilih secara *purposive*, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUR) Syariah di BSI KCP Sidoarjo Gateway. Informan terdiri atas staf pemasaran KUR Syariah yang secara khusus juga menangani penyaluran dan pengajuan pembiayaan KUR Syariah dari awal hingga akhir. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan pengalaman, pengetahuan, dan keterlibatan aktif dalam implementasi KUR Syariah. Informan sebanyak 2 orang (staf pemasaran). Informan satu sudah berpengalaman kurang lebih 2 tahun, dan informan dua sudah berpengalaman 4 tahun di bidangnya, meliputi pemasaran KUR Syariah di BSI KCP Sidoarjo Gateway.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan berdasarkan proses pengumpulan data lapangan, khususnya melalui wawancara. Data yang dihimpun mencerminkan kondisi dan praktik pelaksanaan penyaluran KUR Syariah sesuai dengan mekanisme, prosedur, serta pengalaman para *marketing* dan staf yang terlibat dalam penyaluran KUR Syariah. Temuan yang diperoleh pada saat wawancara tersebut akan diolah dan disusun secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasinya di unit kerja. Proses analisis dilakukan dengan beberapa kesesuaian dan kehati-hatian *prudent banking* sesuai dengan prinsip syariah. Hasil yang disajikan merupakan gambaran nyata mengenai pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah pada BSI KCP Sidoarjo Gateway, yang kemudian akan dianalisis dan dihubungkan dengan teori serta ketentuan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Perkembangan Penyaluran KUR Syariah di BSI KCP Sidoarjo Gateway

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyaluran KUR Syariah di BSI KCP Sidoarjo Gateway mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan tersebut tercermin dari bertambahnya jumlah pengajuan dan realisasi pembiayaan yang disalurkan kepada pelaku UMKM. Staf pemasaran BSI KCP Sidoarjo Gateway mengungkapkan

bahwa tren pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya kebutuhan permodalan usaha mikro dan kecil, khususnya pasca pemulihan ekonomi. Salah satu informan menyatakan, “Dalam beberapa tahun ini terjadi perkembangan yang sangat signifikan pada penyaluran KUR Syariah di BSI KCP Sidoarjo *Gateway*. Terlihat dari peningkatan jumlah pengajuan dan pencairan yang terus bertumbuh seiring meningkatnya kebutuhan permodalan UMKM. Nilai tambah dibandingkan dengan produk lain, KUR Syariah memiliki karakteristik unggulan yang menjadi daya tarik bagi pelaku UMKM, antara lain penggunaan akad sesuai dengan prinsip syariah dan disesuaikan dengan kemampuan nasabah”.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa karakteristik KUR Syariah menjadi faktor utama yang mendorong minat pelaku usaha. Kemudian, menurut informan kedua dengan pengalaman 4 tahun sebagai staf pemasaran, “Semenjak pemerintah menerbitkan adanya KUR untuk membantu permodalan UMKM, minat nasabah KUR juga semakin meningkat. Karena itu, persyaratan KUR juga mudah untuk dilengkapi, namun masih banyak juga yang belum tahu detail pengoperasiannya seperti apa”. Pemaparan dari informan, daya tarik utama bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan pembiayaan produktif adalah secara cepat dan halal. Temuan penting juga menunjukkan bahwa *marketing* BSI Sidoarjo *Gateway* menunjukkan kepuasan nasabah dan persepsi positif terhadap kehalalan pembiayaan yang meningkat.

Pelaksanaan KUR Syariah dalam Perluasan Akses Masyarakat

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan KUR Syariah di BSI Sidoarjo *Gateway* dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahapan tersebut meliputi, pengajuan awal oleh nasabah, pengumpulan persyaratan, survei lapangan untuk menilai kelayakan usaha, analisis pembiayaan, penandatanganan akad syariah jika telah disetujui, hingga pencairan dana ke rekening nasabah. Persyaratan pengajuan KUR Syariah dinilai relatif sederhana dan disesuaikan dengan ketentuan pemerintah. Nasabah diwajibkan memiliki usaha aktif minimal 12 bulan/1 tahun, dan sedang tidak menerima pembiayaan KUR di tahun berjalan, serta memenuhi persyaratan administratif seperti identitas diri dan legalitas usaha. Kesederhanaan persyaratan ini memungkinkan pelaku usaha yang sebelumnya tidak terlayani *unbanked* untuk memperoleh akses pembiayaan perbankan syariah.

Keberadaan BSI KCP Sidoarjo *Gateway* terbukti berkontribusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki rekening bank syariah kini terhubung dengan sistem perbankan formal dan memperoleh modal usaha secara halal, transparan, dan adil.

Tantangan dalam Penyaluran KUR Syariah

Hasil penelitian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang dihadapi dalam proses penyaluran KUR Syariah. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha mikro, keterbatasan kelengkapan dokumen legalitas usaha, kurangnya pembukuan sederhana, serta keterbatasan jangkauan wilayah pemasaran.

Staf pemasaran mengungkapkan bahwa sebagian calon nasabah masih belum memahami konsep akad syariah serta perbedaan KUR syariah dengan pembiayaan konvensional. Kondisi ini menuntut peran aktif staf pemasaran untuk memberikan edukasi dan pendampingan agar nasabah dapat memenuhi persyaratan pembiayaan serta memahami mekanisme akad secara menyeluruh.

Ringkasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang telah dikumpulkan dari informan, diperoleh sejumlah temuan utama terkait penyaluran KUR Syariah di BSI KCP Sidoarjo *Gateway*. Ringkasan temuan penelitian disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Temuan Penelitian

Aspek	Temuan
Perkembangan Penyaluran	Meningkat setiap tahun
Literasi Keuangan	Meningkat melalui edukasi berkelanjutan
Aksesibilitas	Banyak nasabah baru (<i>unbanked</i>) terhubung bank
Kontribusi Inklusi	Akses modal dan rekening syariah meningkat
Peran <i>Marketing</i>	Sangat sentral dalam keberhasilan penyaluran
Tantangan	Teratasi melalui strategi kolaboratif dan persua

Aspek ringkasan temuan penelitian dalam tabel menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran KUR Syariah tidak hanya berdampak pada akses permodalan UMKM, tetapi juga mendorong peningkatan literasi keuangan dan keterhubungan masyarakat dengan layanan perbankan syariah.

Pembahasan Penelitian

Pembahasan ini bertujuan untuk menginterpretasikan temuan penelitian terkait penyaluran KUR Syariah di BSI KCP Sidoarjo *Gateway* dengan mengaitkannya dengan konsep inklusi keuangan dan nilai ekonomi Islam. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan hasil wawancara, teori inklusi keuangan syariah, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan. Pembahasan difokuskan pada peran KUR Syariah dalam memperluas inklusi keuangan, peran strategis staf pemasaran, serta tantangan dan strategi penyaluran pembiayaan syariah.

KUR Syariah dalam Perspektif Inklusi Keuangan dan Ekonomi Islam

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran KUR Syariah di BSI Sidoarjo *Gateway* sejalan dengan konsep inklusi keuangan dalam perspektif ekonomi Islam. Inklusi keuangan syariah tidak hanya berorientasi pada perluasan akses layanan, tetapi juga menekankan nilai keadilan (*al-adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keberlanjutan (*istidamah*). Pembiayaan tanpa riba, margin yang transparan, serta tidak adanya denda keterlambatan mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam transaksi keuangan syariah (Rismanto, 2025).

Dari perspektif inklusi keuangan, KUR syariah berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terakses layanan perbankan *unbanked*. Melalui pembiayaan produktif yang sesuai dengan prinsip syariah, pelaku usaha memperoleh kesempatan tanpa harus bergantung pada keuangan informal. Berdasarkan hasil temuan penelitian, penyaluran KUR syariah juga mendorong bertambahnya jumlah nasabah baru yang terhubung dengan sistem perbankan dan sumber pembiayaan, sekaligus menjadi pintu masuk menuju inklusi keuangan yang lebih luas.

Kerangka ekonomi Islam, KUR syariah juga mencerminkan fungsi sosial tolong-menolong perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Hal tersebut juga telah tertuang dalam hadis (HR. Muslim No. 2699), yaitu: “Barang siapa meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitan di hari kiamat. Dalam konteks perbankan syariah, fungsi ini menegaskan bahwa orientasi tidak semata-mata tentang profit, tetapi juga pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat (Ainolyaqin, 2024). Pembiayaan yang

diberikan kepada sektor produktif UMKM mendukung prinsip distribusi kekayaan yang lebih merata serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Peran Staf Pemasaran sebagai Educator, Facilitator, dan Connector

Peran staf pemasaran KUR Syariah tidak terbatas pada pemasar produk keuangan, melainkan juga sebagai *educator*, *facilitator* dan *connector*. Staf pemasaran menjembatani pelaku UMKM dengan akses pembiayaan formal yang sesuai dengan prinsip syariah (Putri et al., 2024). Peran strategis staf pemasaran melalui *educator*, dengan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM mengenai literasi keuangan syariah, termasuk pemahaman akad, mekanisme pembiayaan, serta hak dan kewajiban nasabah. Peran edukatif ini penting mengingat rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masih menjadi salah satu hambatan utama dalam perluasan inklusi keuangan. Selain sebagai edukasi, staf pemasaran juga berperan sebagai *facilitator*, yang mendampingi nasabah dalam proses administrasi dan pengajuan pembiayaan. Pendampingan ini mencakup bantuan dalam melengkapi dokumen legalitas usaha, penyusunan administrasi sederhana, hingga proses survei dan analisis kelayakan usaha. Peran fasilitas tersebut membantu mengurangi hambatan struktural yang sering dihadapi UMKM, terutama pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan pengetahuan administrasi dan akses terhadap informasi (Lut et al., 2025). Kemudian untuk peran staf pemasaran sebagai *connector* yang menjembatani pelaku UMKM dengan akses pembiayaan formal berbasis syariah. Peran ini sejalan dengan konsep tolong-menolong yang telah dijelaskan sebelumnya. Perbankan syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pemberdayaan dengan membangun hubungan yang bersifat persuasif dan berbasis kepercayaan. Staf pemasaran berkontribusi langsung dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam sistem keuangan syariah.

Tantangan dan Strategi Optimalisasi Inklusi Keuangan Syariah

Rendahnya literasi keuangan dan keterbatasan legalitas usaha menunjukkan bahwa inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan produk, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memahami dan mengakses layanan keuangan. Temuan ini sejalan dengan yang menegaskan bahwa literasi merupakan faktor kunci keberhasilan inklusi keuangan syariah. Strategi edukasi intensif, pendampingan usaha, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas UMKM menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan strategi yang tepat, KUR Syariah berpotensi menjadi instrumen yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung penguatan ekonomi UMKM.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran KUR Syariah di BSI KCP Sidoarjo *Gateway* berperan signifikan dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah. Perkembangan penyaluran ini yang terus meningkat mencerminkan pertumbuhan permodalan bagi UMKM sekaligus meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pembiayaan berbasis syariah. Karakteristik KUR Syariah menawarkan kemudahan dengan transparansi serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penyaluran KUR menambah jumlah nasabah baru yang belum tersentuh layanan bank maupun layanan keuangan. Pelaksanaan KUR Syariah di BSI Sidoarjo *Gateway* berjalan efektif berkat peran staf pemasaran (*marketing*) yang tidak hanya berfungsi sebagai pemasar, tetapi juga sebagai edukator, fasilitator, dan penghubung antara UMKM dan layanan keuangan syariah. Dengan demikian, KUR Syariah terbukti menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan produktif serta memperkuat inklusi keuangan syariah di wilayah Sidoarjo secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, N. H., Brawijaya, A., & Khoir, M. (2023). Aksesibilitas Umkm Pedesaan Terhadap Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Syariah Indonesia. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 9(1), 10–20. <https://doi.org/10.30997/jn.v9i1.9302>
- Ainolyaqin, A. Y. (2024). Pengembangan Perbankan Syariah Dalam Mendukung Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1130. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12117>
- Alya, U., & Rahman, T. (2024). Strategi Program Kur Bank Syariah Indonesia Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kota Batu. *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 10(1), 74–84. <https://doi.org/10.30997/jn.v10i1.13305>
- Ditjen Perbendaharaan. (2024). *Press Release APBN Regional Jawa Timur s.d. 31 Desember 2024*. DJPB,Kemenkeu. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jatim/id/data-publikasi/press-release/3042-press-release-apbn-regional-jawa-timur-s-d-31-desember-2024.html#:~:text=Realisasi Insentif Fiskal naik 38,yang telah dihasilkan antara lain>
- Faiza, J. A., Dewi, S., Sjech, U. I. N., & Djambek, M. D. (2025). *Peran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Sudirman*. 9, 32646–32650.
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). The Essence of the Difference between Qualitative and Quantitative Methods. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159.
- Lut, F., Nazla, A. P., Yusup, M., Fauzi, A. M., Sibitiani, N. A., & Maulana, I. (2025). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Membantu UMKM di Indonesia*. 3(4).
- Masitoh, S., & Sulistiowati, T. (2025). *BI Catat Transaksi QRIS Capai Rp 579 Triliun pada Semester I 2025*. Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/bi-catat-transaksi-qriskapai-rp-579-triliun-pada-semester-i-2025>
- OJK. (2020). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2019*. Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan 2019. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-2019.aspx>
- OJK. (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2022*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Pages/Laporan-Perkembangan-Kuangan-Syariah-Indonesia-2022>
- OJK. (2023). ROADMAP LEMBAGA PENJAMIN 2023-2027: Mendorong Tumbuhnya Lembaga Penjamin yang Kuat dan Terpercaya untuk Mendukung Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045. *Direktorat Pengembangan IKNB Dan Inovasi Keuangan Digital, 2027*. <https://ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Draft Roadmap Pengembangan Lembaga Penjamin Indonesia.pdf>
- OJK. (2024). SIARAN PERS BERSAMA OJK DAN BPS UMUMKAN HASIL SURVEI NASIONAL LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN TAHUN 2024 Jakarta,. *Otoritas Jasa Keuangan Dan Badan Pusat Statistik*, 6.
- PEMKAB. (2024). *Pemkab Sidoarjo Arahkan UMKM Daftarkan Produknya di E-Katalog*. Diskominfo. <https://sidoarjokab.go.id/berita/detail/1717723935/0>
- Pratiwi, A. E., Nurfadillah, A. D., Nursadrina, L., Mufida, L., Nurjannah, & Nengsi, S. R. (2023). Inklusi Keuangan dalam Industri Perbankan: Mendorong Akses Layanan Perbankan. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE)*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/10.59971/jimbe.v1i1.4>

- Putri, Y. D., Asnainia, & Shar, A. (2024). *PERAN KARYAWAN MARKETING PERBANKAN SYARIAH DALAM MENJAWAB KERAGUAN UMAT ISLAM TERHADAP PERBANKAN*. 7(November).
- Rismanto. (2025). *Analisis Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Pembiayaan Mikro Berbasis Akad Murabahah Dan Mudharabah*. 04, 577–588.
- Rokhamah, Yana, P. R., Hernadi, N. A., Rachmawati, F., Irwanto, & Dey, N. P. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. www.penerbitwidina.com
- Sabilah, S., & Hafizd, J. Z. (2025). *Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Mikro Syariah Pada Bank Syariah Indonesia Kc Cirebon Dr Cipto Mangunkusumo*. 02(01), 15–26.